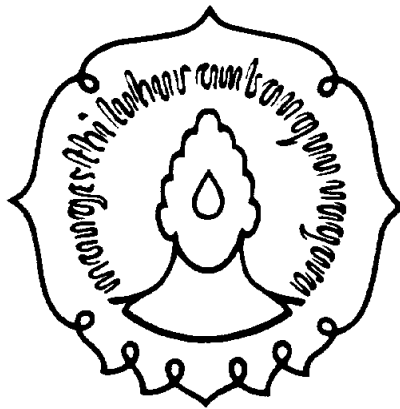


**PENGARUH PERBEDAAN PENGAKUAN LABA KOMERSIAL
DAN FISKAL TERHADAP SPT TAHUNAN PPH BADAN YANG
DILAPORKAN KPRI “MAKARTI” PURWANTORO
TAHUN PAJAK 2002**



Tugas Akhir

Diajukan untuk memenuhi Sebagian persyaratan
untuk mencapai Gelar Derajat Sarjana Ahli Madya

Program D3 Perpajakan

Disusun oleh :

**Heny Dartiyanti
F. 3400063**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2003**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna memenuhi syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ahli Madya Akuntansi Perpajakan.

Surakarta, April 2003

Dra. Y. Anni Aryani, M Prof Acc., AK
NIP: 131 997 458

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh Tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar derajat Sarjana Ahli Madya Akuntansi Perpajakan.

Surakarta, Juli 2003

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Dra. Muthmainah, MSi, Ak (.....)

Dosen Penguji

2. Dra. Y. Anni Aryani, M Prof Acc., Ak (.....)

Dosen Pembimbing

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepada mu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepada mu apa yang telah kamu kerjakan (QS. Al-Maa Idah : 105).

Penulis persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak Tercinta.
2. Kakak dan Adik ku.
3. Almamater ku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Ahli Madya program studi D3 Akuntansi Perpajakan.

Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Salamah Wahyuni, SU. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, MSi., Ak. Selaku Ketua Program D3 Perpajakan Universitas Sebelas Maret.
3. Ibu Dra. Y. Anni Aryani, M Prof Acc., Ak. Selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Drs. Eko Arief S., MSi., Ak. Selaku Dosen Pembimbing Akademis.
5. Bapak Slamet, S.Pd. Selaku ketua KPRI Makarti Purwantoro, terima kasih atas ijinnya untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Estu Tentrerm, S.Pd dan Bapak Puguh Heri Santoso, A. Ma. Pd serta Mba' Nanik dan semua staf karyawan KPRI Makarti Purwantoro, terima kasih atas bantuannya mengumpulkan data yang diperlukan.

7. Keluarga ku tercinta yang selalu membimbing, memeberikan dorongan, dukungan dan do'a.
8. Sahabat ku Yuni, terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini (Sukses dan abadi selalu untuk kita).
9. Teman-teman ku D3 Perpajakan khususnya kelas A angkatan 2000, terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
10. Teman-teman ku Edelweis Putri Baru (mba' Yeni, Eka, Ari, Dian, Novi, dan semuanya....) terima kasih atas dukungan dan do'anya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun penulis telah dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini namun penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Untuk itu penulis membuka diri atas saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi seluruh pembaca pada saat ini maupun pada masa mendatang.

Amien.

Surakarta, April 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Berdirinya KPRI Makarti Purwantoro	1
B. Bidang Permodalan	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Bidang Kelembagaan	5
E. Bidang Usaha	5
F. Perumusan Masalah	6
BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan pustaka	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Pemeriksaan pajak	8

3. Perbedaan Pajak Penghasilan antara Akuntansi Komersial dan Fiskal	10
4. Rekonsiliasi Fiskal	16
BAB III TEMUAN	
A. KELEBIHAN	37
B. KEKURANGAN	37
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	39
B. SARAN	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 : Surat Pernyataan	
2 : Surat Keterangan Penelitian	
3 : SSP dan SPT	
4 : Neraca KPRI Makarti Purwantoro Tahun 2002	
5 : Perhitungan Hasil Usaha USP dan Pusat KPRI Makarti Purwantoro Tahun 2002	
6 : Perhitungan Hasil Usaha Pertokoan KPRI Makarti Purwantoro Tahun 2002	
7 : Realisasi Biaya PKPRI Kabupaten Wonogiri Tahun 2002	
8 : Pengelompokan Aktiva Tetap	

DAFTAR TABEL

TABEL

II.1	Laporan Rugi/Laba USP dan Pusat	17
II.2	Laporan Rugi/Laba Pertokoan	18
II.3	Neraca Gabungan	19
II.4	Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak	23
II.5	Tarif Penyusutan Harta Berwujud	24
II.6	Daftar Aktiva Tetap	24
II.7	Daftar Aktiva Tetap Fiskal	26
II.8	Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Rugi/Laba USP dan Pusat	28
II.9	Rekonsiliasi Fiskal Pertokoan	28
II.10	Rekonsiliasi Fiskal Neraca Gabungan	29
II.11	Jurnal Koreksi fiskal	31
II.12	Buku Besar Koreksi Fiskal	31
II.13	Neraca Gabungan Fiskal	33
II.14	Perhitungan Rugi/Laba Fiskal USP dan Pusat	34
II.15	Perhitungan Rugi/Laba Fiskal Pertokoan	35

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

I.I. Bagan Struktur Organisasi	3
--------------------------------------	---

ABSTRAKSI
PENGARUH PERBEDAAN PENGAKUAN LABA KOMERSIAL DAN
FISKAL TERHADAP SPT TAHUNAN PPH BADAN YANG
DILAPORKAN KPRI MAKARTI PURWANTORO
TAHUN PAJAK 2002

HENY DARTI YANTI
F3400063

KPRI Makarti Purwanto merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang bertempat kedudukan di Jalan Cendana Nomor 26, RT 03/02 Desa Bangsri Kecamatan Purwanto Kabupaten Wonogiri. Anggotanya terdiri dari para Guru Sekolah Dasar dan para staf pengajar. Kegiatan/bidang usahanya meliputi unit simpan pinjam, unit waserda, fotocopy dan pengetikan komputer.

Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah karena adanya perbedaan penghitungan antara laba yang dihasilkan oleh proses Akuntansi Komersial (SAK) dengan laba usaha kena pajak menurut konsep Fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan laba kena pajak dihitung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, sedangkan laba Akuntansi Komersial didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan yang sebenarnya terutang oleh KPRI Makarti Purwanto pada tahun pajak 2002 berdasarkan penghitungan fiskal dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesalahan pengakuan biaya dan penghasilan oleh KPRI Makarti Purwanto dari hasil rekonsiliasi fiskal dalam pemeriksaan kantor sederhana pada tahun 2002 terhadap SPT Tahunan yang telah dilaporkan.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya pajak kurang bayar sebesar Rp 142.495,00 (Rp 605.299,00 – Rp 402.804,00). Karena pajak yang diakui oleh KPRI Makarti sebesar Rp 1.486.654,00 dan PPh pasal 25 yang telah di setor sebesar Rp 1.023.850,00 Sehingga terdapat pajak kurang bayar Rp 402.804,00 sedangkan pajak yang sebenarnya terutang berdasarkan fiskal sebesar Rp 1.629.149,00 sehingga terdapat pajak kurang bayar Rp 605.299,00. selain itu juga ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dari KPRI Makarti Purwanto. Kelebihannya yaitu KPRI Makarti telah melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu yaitu tidak melebihi batas maksimal pelaporan SPT Tahunan pada tanggal 31 Maret 2003 dan telah membayar pajak pasal 25 tepat waktu setiap bulannya yaitu sebelum tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kekurangan dari KPRI Makarti ini adalah Tarif yang digunakan dalam menghitung depresiasi aktiva nya belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, pengeluaran yang berupa natura dan sumbangan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha belum dikeluarkan dari penghitungan pajaknya, pendapatan berupa Dividen, SHU, dan Jasa Simpanan masih diperhitungkan dalam penghitungan pajaknya dan penghitungan pajak dalam SPT Tahunan Badan yang dilaporkan terlalu kecil sebesar Rp 142.495,00.

Berdasarkan temuan tersebut maka saran penulis kepada KPRI Makarti adalah selain membuat laporan keuangan komersial juga membuat laporan

keuangan fiskal dan diberikan pembinaan serta pelatihan mengenai perpajakan bagi anggota/pengurus, dan untuk Dirjen Pajak sebaiknya memberikan pembinaan/penyuluhan dan pelatihan tentang perpajakan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya.

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Singkat Berdirinya KPRI “MAKARTI” Purwantoro

KPRI “Makarti” Purwantoro didirikan pada tahun 1962, dengan nama “KPNG”. Pada awal berdirinya koperasi ini merupakan gabungan yang meliputi empat wilayah Kecamatan, yaitu: Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, dan Kismantoro yang bertempat kedudukan di Slogohimo. Anggotanya terdiri dari para Guru Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, dan Kismantoro. Koperasi ini berada di bawah pengawasan PS (Binsarpralub).

Pada tahun 1969 koperasi yang semula merupakan gabungan empat wilayah tersebut akhirnya dipecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama meliputi Slogohimo dan Bulukerto, dengan bertempat kedudukan di Slogohimo. Sedangkan kelompok kedua meliputi Purwantoro dan Kismantoro dengan bertempat kedudukan di Purwantoro.

Tahun 1976 KPNG ini akhirnya berdiri sendiri dengan bertempat kedudukan di Purwantoro. Anggota dari KPNG ini tidak hanya terdiri dari para Guru Sekolah Dasar, tetapi para staf pengajarpun bisa menjadi anggota.

Pada tanggal 30 September 1996 KPNG ini berubah menjadi KPRI “Makarti” Purwantoro, dengan bertempat kedudukan di Purwantoro. Perubahan ini berdasarkan Akta Anggaran Dasar KPNG tahun 1996.

Pada awal berdirinya koperasi ini belum memiliki gedung sendiri sebagai tempat kedudukan, untuk itu mereka menempati rumah perseorangan sebagai tempat kedudukan sementara. Pada tanggal 18 Januari 1989 koperasi ini akhirnya

memiliki dan menempati tanah serta gedung milik sendiri. Kemudian pada tahun 1996 gedung yang dimilikipun bertambah, dimana gedung pertama digunakan sebagai pertokoan sedangkan gedung yang kedua digunakan sebagai kantor pusat (USP).

Sejak berdiri sampai sekarang koperasi ini telah mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan, adapun periodisasinya sebagai berikut:

1. Periode Slogohimo : 1962 – 1968
2. Periode Bp. Tukino : 1969 – 1984
3. Periode Bp. Karman : 1985 – 1989
4. Periode Bp. Sarino : 1990 – 1996
5. Periode Bp. Slamet : 1997 – sekarang.

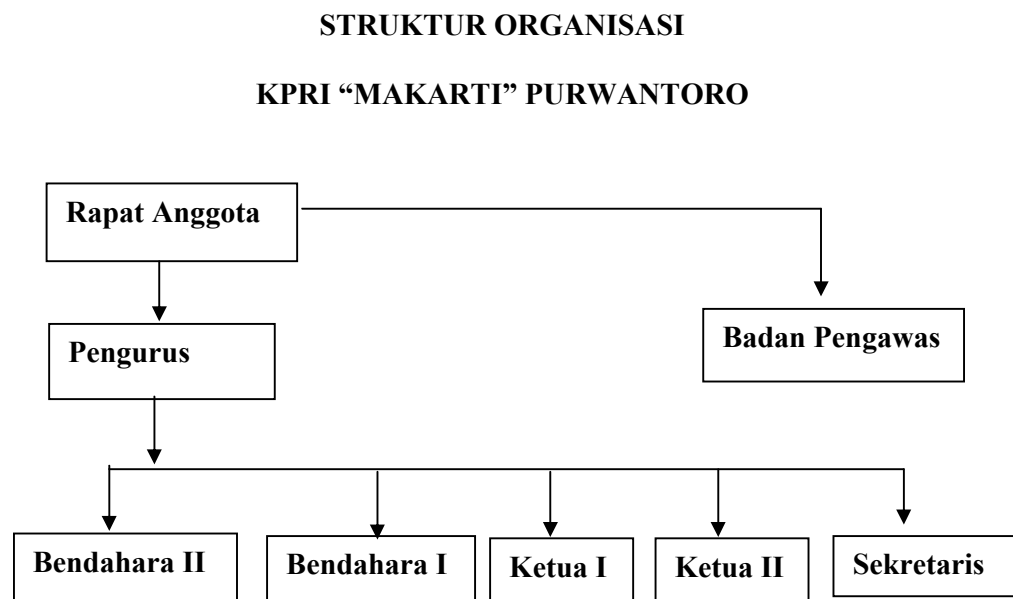
2. Bidang Permodalan

- a. Untuk menuju ke arah kemandirian, maka cara yang ditempuh adalah dengan cara memperbanyak modal dari anggota dengan memperluas jenis tabungan, besar dan kecilnya, serta pengambilannya. Modal sendiri ini terdiri dari:

- 1) Simpanan rutin tiap anggota setiap bulan sama, tidak diambil sebelum anggota berhenti, terdiri dari:
 - a) Simpanan Wajib
 - b) Simpanan Bantu Modal
- 2) Simpanan anggota yang dapat diambil dalam waktu tertentu dan diikuti anggota yang berminat, terdiri dari:

- a) Simpanan Hari Raya
 - b) Simpanan Masa Depan
 - c) Simpanan Pendidikan
 - d) Simpanan Karya Wisata
 - e) Simpanan Deposito
 - f) Simpanan Wajib Kredit
- b. Peningkatan modal dengan cara meningkatkan modal kerja dari pendapatan.
- c. Mencari pinjaman dari pihak ketiga dan KPRI Kabupaten Wonogiri.

3. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPRI “Makarti” Purwantoro

Diskripsi Kerja Koperasi

1. Rapat Anggota Tahunan

Diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun. Merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi yang mempunyai tugas:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
- b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas,
- c. Menetapkan kebijaksanaan umum koperasi,
- d. Menegaskan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam bidang organisasi dan usaha koperasi,
- e. Pembagian sisa hasil usaha,
- f. Penggabungan dan pembubaran koperasi.

2. Kepengurusan

Susunan pengurus masa bakti 2000 sampai dengan 2002 sebagai berikut:

- a. Ketua I : Slamet, S. Pd
- b. Ketua II : Sumarso, A. Ma. Pd
- c. Sekretaris : Estu Tentrem, S. Pd
- d. Bendahara I : Puguh Heri Santoso, A. Ma. Pd
- e. Bendahara II : Pariyo, BA

3. Kepengawasan

Susunan Pengawas masa bakti 2000 sampai dengan 2002 sebagai berikut:

- a. Ketua : Sutarto, BA
- b. Anggota : Rakidjo
- c. Anggota : Satiyo, S.Pd

4. Karyawan

Karyawan Pertokoan	: Sutarman
Karyawan Fotocopy	: Katiman
Karyawan Pertokoan	: Tri Widiyati
Karyawan Juru Buku	: Nanik Wiyatni

4. Bidang Kelembagaan

- a. Koperasi “Makarti” Purwantoro merupakan koperasi primer dengan Badan Hukum Nomor: 1967b/BH/KWK.II/IX/96 tanggal 30 September 1996 dan diamandemen tahun 2001, tentang periode kepengurusan.
- b. Alamat Jelas: Jalan Cendana Nomor 26. RT 03, RW 02 Desa Bangsri , Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Telp: (0273) 415168.
- c. Jalur Vertikal Organisasi di bawah binaan PKPRI Kabupaten Wonogiri dan termasuk mitra binaan PT Jamsostek dan PT PLN Jawa Tengah.
- d. Jumlah Anggota pada akhir tahun 2001 ada 286 orang dan akhir tahun 2002 tinggal 281 orang.
- e. Pengurus, Pengawas dan karyawan ada 12 orang.

5. Bidang Usaha

a. Unit Simpan Pinjam

Simpan Pinjam merupakan unit otonom yang memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan laba perusahaan. Belum mampu mencukupi 100% kebutuhan anggota. Jasa tetap 1,5%, Jasa 20% untuk Pemupukan

Modal Kerja (PMK). Semua simpanan diberi jasa 10% setahun, kecuali SWK dan deposito. Simpanan Deposito diberi bunga 15,6% setahun.

b. Unit Waserda, Fotocopy dan Pengetikan Komputer

Unit waserda, fotocopy, laminating, penjilidan dan ketik komputer menjadi satu pengelolaan. Hasil fotocopy disetor ke pemegang kas waserda, meski demikian operator fotocopy dan pengetikan membukukan sendiri.

6. Perumusan Masalah

Dalam Penulisan Laporan ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Berapakah besarnya pajak yang terutang sebenarnya oleh KPRI "Makarti" Purwantoro setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal atau setelah dilakukan perhitungan berdasarkan fiskal?
- b. Bagaimana pengaruh perbedaan pengakuan laba komersial dan fiskal terhadap SPT Tahunan PPh Badan yang dilaporkan oleh KPRI "Makarti" Purwantoro tahun pajak 2002?

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Soemitro. 1990, adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo: 1997).

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Adapun fungsi dari pajak itu sendiri meliputi:

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Pemeriksaan Pajak

Menurut pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian ini maka fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan wajib pajak dalam menjalankan asas *self assessment*, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan yang menjadi Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan. Sedangkan obyek dari

pemeriksaan itu sendiri pada umumnya adalah SPT Tahunan dan/atau SPT Masa beserta lampiran-lampirannya.

Tujuan pemeriksaan pajak sesuai dengan pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 adalah:

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf (c) diatas tidak dipenuhi.
2. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu:
 - a. pemberian npwp secara jabatan;
 - b. penghapusan npwp;
 - c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak;
 - d. wajib pajak mengajukan keberatan;

- e. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
- f. pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai;
- i. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000, ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak;
2. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

3. Perbedaan Pajak Penghasilan antara Akuntansi Komersial (SAK) dan Fiskal.

Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyerahkan SPT Tahunan ke KPP. Dimana dalam SPT tersebut disertakan laporan yang menunjukkan informasi tentang laba yang merupakan obyek pajak. Namun demikian adakalanya jumlah laba yang dihasilkan oleh proses akuntansi komersial berbeda dengan laba usaha kena pajak. Perbedaan tersebut disebabkan karena laba

kena pajak dihitung berdasarkan Undang-undang pajak, sedangkan laba akuntansi komersial didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.

Adapun definisi dari laporan keuangan komersial itu sendiri adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang bersifat netral dan tidak memihak yang dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak. Laporan keuangan ini mempunyai manfaat sebagai pertanggungjawaban manajemen dalam mengambil keputusan.

Sedangkan definisi dari laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan atau disusun khusus untuk keperluan perpajakan. Laporan keuangan fiskal mempunyai manfaat sebagai dasar penghitungan besarnya pajak yang terutang.

Perbedaan penghitungan laba tersebut disebabkan adanya pos-pos rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh menurut Undang-undang atau sebaliknya dan pos-pos pendapatan dan biaya yang sudah diakui menurut akuntansi tetapi pajak belum diakui atau sebaliknya. Pengakuan pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan yaitu seluruh penghasilan yang diperoleh dari aktivitas normal usahanya, penghasilan ini diakui pada saat diperoleh dan biaya diakui pada saat terutang. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu stelsel akrual. Pengakuan biaya berdasarkan akuntansi yaitu seluruh biaya yang dipergunakan untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan pendapatan menurut fiskal adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak. Penghasilan menurut pajak diakui pada saat diterima atau

diperoleh, hal ini sesuai dengan prinsip stelsel akrual dan stelsel kas. Sedangkan biaya menurut fiskal adalah semua biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Karena dalam perpajakan untuk dapat dibebankan sebagai biaya pengeluaran itu harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha/kegiatan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak.

Secara rinci perbedaan dalam pengakuan pendapatan dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1 Penghasilan yang diakui dalam laba usaha oleh akuntansi komersial, tetapi tidak diakui atau dihitung sebagai penghasilan dalam laba usaha kena pajak. Jenis penghasilan ini termasuk dalam kelompok penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, misalnya: Penghasilan berupa bunga bank, penghasilan dari hadiah undian, keuntungan dari penjualan penyertaan saham di pasar modal.
- 2 Penghasilan yang tidak diakui dalam laba usaha oleh akuntansi komersial, tetapi diakui dalam laba usaha kena pajak. Misalnya; sumbangan/hibah dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan.

Perbedaan yang disebabkan karena perbedaan dalam hal pengakuan biaya adalah biaya yang diakui sebagai pengurangan laba akuntansi komersial, tetapi tidak diakui sebagai pengurang atas laba usaha kena pajak. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya-biaya yang tergolong dalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*).

Menurut pasal 6 UU No. 17 tahun 2000 yang termasuk biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh barang-barang atau harta yang berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Sedangkan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan pasal 9 UU No. 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

- c. Pembentukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan ;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak;
- j. Gaji kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Selain perbedaan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, perbedaan laba juga terjadi karena adanya perbedaan

dalam kebijaksanaan akuntansi. Perbedaan tersebut dikelompokkan dalam dua kategori yaitu perbedaan yang bersifat tetap/permanen dan perbedaan yang bersifat sementara /waktu.

- a. Perbedaan tetap yaitu transaksi-transaksi pendapatan dan biaya yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak (peraturan perpajakan) atau sebaliknya. (Tjahjono dan Fakhri, 2000).
- b. Perbedaan waktu yaitu perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk penghitungan laba. Ada suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara, karena akan tertutup periode sesudahnya. (Tjahjono dan Fakhri, 2000).

Penyebab dari perbedaan tetap menurut Lumbantoruan antara lain meliputi:

- a. Pemberian kenikmatan atau natura
- b. Biaya jamuan tamu kecuali yang dilampiri dengan daftar nominatif
- c. Sumbangan
- d. Rugi dari pemakaian
- e. Pajak penghasilan pasal 26 atas royalti yang ditanggung oleh pemberi hasil
- f. Pendapatan bunga, hibah dan warisan, serta
- g. Bunga dan deviden.

Yang menyebabkan perbedaan waktu menurut Lumbantoruan, 1996 adalah perbedaan pengakuan terhadap:

- a. Piutang usaha, Efek, Persediaan
- b. Tagihan atau utang dalam valuta asing
- c. Harta berwujud dan tidak berwujud
- d. Penyertaan saham
- e. Biaya pendidikan dan perluasan usaha
- f. Biaya sebelum produksi komersial
- g. Selisih kurs
- h. Pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain

- i. Pengakuan penghasilan dan biaya atas proyek jangka panjang
- j. Hak penambangan dan Penguasaan hutan.

4. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas laba usaha menurut akuntansi komersial dalam rangka menghitung besarnya laba usaha kena pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengenali penyesuaian pajak yang diperlukan
- b. Melakukan analisis terhadap elemen-elemen yang perlu disesuaikan untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak.
- c. Melakukan penyesuaian fiskal, dengan cara melakukan penambahan atau pengurangan atas laba usaha, sebagai berikut:

Laba Usaha (Akuntansi Komersial) Penyesuaian Fiskal: +/-Akibat kebijaksanaan akuntansi +/-Akibat pengakuan pendapatan +/-Akibat pengakuan biaya
Laba Usaha Kena Pajak

- d. Menyusun laporan keuangan fiskal, sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- e. Mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. (Achmad Tjahjono dan Husain Fakhri, 2000).

B. ANALISIS DATA

Untuk mempermudah pemahaman dari rekonsiliasi fiskal, penulis menyajikan data yang diperoleh dari KPRI "Makarti" Purwanto sebagai sampel dalam penelitian ini. Data tersebut berupa laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Daftar Aktiva Tetap dan SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2002.

Data tersebut antara lain seperti dalam tabel berikut ini

Tabel 2.1
KPRI "MAKARTI" PURWANTORO
LAPORAN RUGI/LABA USP DAN PUSAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2002
(dalam rupiah)

PENDAPATAN USP	JUMLAH
Jasa USP	303.268.315,00
Jasa PKP	
a. SHU PKP	1.262.300,00
b. jasa Simpanan PKP	3.997.150,00
Diskon Barang	1.527.500,00
Fee Wartel	454.700,00
Deviden BKE	8.000,00
Jumlah	310.517.965,00
BIAYA BEBAN	
Biaya Operasional	57.093.928,00
Bunga Hutang	140.873.129,00
PMK	80.000.000,00
Jasa Pengurus	6.150.000,00
Lain-lain	16.373.829,00
Jumlah	300.490.886,00
SHU USP DAN PUSAT	
Pendapatan	310.517.965,00
Biaya	(300.490.886,00)
SHU sebelum pajak	10.027.079,00

Sumber Data: Laporan Rugi/Laba USP dan Pusat KPRI "Makarti" Purwanto.

Tabel 2.2
KPRI”MAKARTI” PURWANTORO
LAPORAN RUGI/LABA PERTOKOAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER2002
(dalam rupiah)

Pendapatan	Jumlah
Penjualan Barang Waserda	370.311.571,00
Penjualan Barang Titipan	8.538.500,00
Pendapatan Unit F/C	40.612.650,00
Jumlah	419.462.721,00
Pembelian	
Stock awal	19.467.875,00
Pembelian barang waserda	354.124.175,00
Pembelian barang titipan	8.697.000,00
Barang siap jual	382.289.050,00
Stock akhir	27.699.769,00
Jumlah	354.589.281,00
Laba waserda dan F/C	64.873.440,00
Discount Barang Titipan	859.600,00
Jumlah	65.733.040,00
Beban Biaya	
Biaya Bunga Pinjaman	440.000,00
Administrasi	1.356.150,00
Honor	8.700.000,00
Rekening Listrik	2.901.450,00
Pakaian Dinas	300.000,00
Lembur F/C	150.000,00
Transport Kulakan	750.000,00
Jasa Servis Mesin F/C	2.022.675,00
Tunjangan Karyawan	1.913.000,00
Jasa Karyawan	1.500.000,00
Penyusutan Mesin F/C	5.425.000,00
Biaya F/C	20.183.300,00
Uang Makan karyawan	3.744.000,00
PMK	11.500.000,00
Jumlah	(60.885.575,00)
SHU	
a. Pendapatan	65.733.040,00
b. pembiayaan	(60.885.575,00)
c. SHU	4.847.465,00

Sumber Data: Laporan Rugi/Laba Pertokoan KPRI “Makarti” Purwanto.

Tabel 2.3
KPRI”MAKARTI” PURWANTORO
NERACA GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2002
(dalam rupiah)

Nama Perkiraan	Jumlah
A. AKTIVA LANCAR	
Kas	2.329.169,00
Piutang KPRI	1.051.521.543,00
Piutang Menengah	140.160.000,00
Piutang Khusus	6.592.121,00
Persediaan Barang waserda	90.381.100,00
Piutang Barang Waserda	27.699.769,00
Jumlah Aktiva Lancar	1.318.683.702,00
B. PENYERTAAN	
Simpanan Pokok PKPRI	150.000,00
Simpanan Wajib PKP RI	40.528.340,00
Simpanan sukarela PKP RI	6.751.375,00
Saham Dekopinda	2.700.000,00
Simpanan Bantu Modal PKP RI	204.100,00
Jumlah Penyertaan	50.333.815,00
C. AKTIVA TETAP	
Inventaris Tanah	24.488.010,00
Gedung Unit I	22.413.250,00
Gedung unit II	39.881.380,00
Mesin Foto Copy	21.700.000,00
Inventaris Kantor dan Toko	19.492.300,00
Bangunan Pagar	18.719.500,00
Akumulasi Penyusutan	(39.283.139,00)
Jumlah aktiva tetap	107.411.301,00
Total Aktiva	1.476.428.818,00
A. PASIVA LANCAR	
Hutang PKP RI	132.355.000,00
Tabungan Hari Raya	10.130.000,00
Tabungan Karya wisata	61.220.000,00
Tabungan Deposito	190.996.180,00
Tabungan Masa Depan	50.494.000,00
Tabungan Sukarela	45.550.000,00
Tabungan Pendidikan	10.698.800,00
Tabungan hari Tua	620.000,00
Simpanan wajib Krediat	43.686.380,00
Dana Pendidikan	1.700.800,00
Dana Sosial	(1.721.715,00)
Dana pemdaker	5.810.305,00
Pajak	388.250,00
Biaya Audit	650.000,00
Hutang Pihak III	0,00
Bunga Simpanan Ymh dibayar	11.856.655,00
Simpanan Bantu Modal	698.766.311,00
Jumlah Pasiva Lancar	1.263.200.966,00

B. PASIVA TAK LANCAR	
Hutang PLN	0,00
Hutang Jamsostek	0,00
Jumlah pasiva Tak Lancar	0,00
C. MODAL SENDIRI	
Simpanan pokok KP RI	7.000.000,00
Simpanan Wajib KPRI	69.567.600,00
Cadangan Modal	93.654.469,00
Resiko Kredit	10.522.152,00
Dana Pembangunan Gedung	17.609.087,00
SHU	14.874.544,00
Jumlah Modal Sendiri	213.227.852,00
Jumlah Pasiva	1.476.428.818,00

Sumber Data: Neraca Gabungan KPRI “Makarti” Purwanto.

Data tersebut merupakan data laporan komersial dari KPRI”Makarti” Purwanto yang akan menjadi dasar penghitungan dalam Rekonsiliasi Fiskal ini. Dari data laporan keuangan konsolidasi di atas berdasarkan penelitian terdapat beberapa perbedaan dengan peraturan perpajakan dan perlu untuk direkonsiliasi. Data tersebut antara lain;

1. Dalam Beban Biaya Pertokoan terdapat biaya Pakaian Dinas sebesar Rp 300.000,00

Analisis:

Biaya dalam bentuk natura merupakan *non deductible expense* sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian fiskal untuk mengurangi beban biaya pertokoan dalam bentuk pakaian dinas. Pengurangan ini berakibat mengurangi biaya dan menambah laba usaha kena pajak sebesar Rp 300.000,00

2. Biaya Akumulasi Depresiasi menurut Komersial sebesar Rp 39.283.139,00

Analisis:

Biaya akumulasi depresiasai menurut komersial lebih besar sebesar Rp 1.146.171,00 (Rp 39.283.139,00 – Rp 38.136.968,00) dari pada fiskal.

Sehingga perlu rekonsiliasi fiskal untuk menghitung besarnya laba usaha kena pajak. Rekonsiliasi dilakukan untuk mengurangi jumlah akumulasi depresiasi sebesar Rp 1.146.171,00 yang mengakibatkan berkurangnya biaya dan menambah laba kena pajak dalam jumlah yang sama.

3. Dalam biaya lain-lain USP dan Pusat terdapat biaya dana sosial sebesar Rp 4.634.122,00 dan biaya penyusutan sebesar Rp 7.000.000,00.

- a. Analisis biaya sosial:

Sumbangan untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja, usaha, kepemilikan, dan penguasaan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga perlu rekonsiliasi untuk menghitung besarnya laba usaha kena pajak. Rekonsiliasi dilakukan untuk mengurangi jumlah dana sosial sebesar Rp 4.634.122,00 dan berakibat menambah jumlah laba usaha kena pajak dalam jumlah yang sama.

- b. Analisis biaya penyusutan:

Biaya penyusutan menurut komersial lebih besar Rp 1.164.269,00 (Rp 7.000.000,00 – Rp 5.835.731,00) dari pada fiskal. Sehingga perlu rekonsiliasi fiskal untuk menghitung laba usaha kena pajak. Rekonsiliasi dilakukan untuk mengurangi jumlah penyusutan sebesar Rp 1.164.269,00 yang mengakibatkan berkurang biaya sebesar Rp 1.164.269,00 dan menambah laba kena pajak dalam jumlah yang sama.

4. Dalam pendapatan USP terdapat Pembagian Deviden BKE Rp 8.000,00

Analisis:

Deviden yang diterima oleh badan merupakan penghasilan yang dikecualikan dari obyek pajak. Sehingga diperlukan rekonsiliasi untuk mengurangi sejumlah Rp 8.000,00 dari rekening pendapatan USP.

5. Dalam Bunga Hutang USP dan Pusat terdapat tunjangan karyawan sebesar Rp 586.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Rp 100.000,00
 - b. Sumbangan pangan Rp 216.000,00
 - c. Sumbangan kesehatan Rp 120.000,00
 - d. Tunjangan hari raya Rp 150.000,00

Analisis:

Pakaian Dinas, Tunjangan Hari Raya dan Sumbangan untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja, usaha, kepemilikan, dan penguasaan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*). Sehingga perlu rekonsiliasi untuk menghitung besarnya laba usaha kena pajak. Rekonsiliasi dilakukan untuk mengurangi jumlah pakaian dinas, sumbangan pangan, sumbangan kesehatan, dan tunjangan hari raya sebesar Rp 586.000,00 dan berakibat menambah jumlah laba usaha kena pajak dalam jumlah yang sama.

6. Pendapatan jasa simpanan PKP telah dikenakan pajak final

Analisis:

Penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak perlu diperhitungkan dalam menghitung laba usaha kena pajak. Koreksi fiskal diperlukan untuk

mengurangi sejumlah Rp 5.259.450,00 dari rekening pendapatan jasa PKP yang berarti terjadi pengurangan terhadap laba usaha kena pajak dalam jumlah yang sama.

Tarif pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak menurut UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut

Tabel 2.4
Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00	30% (tiga puluh persen)

Sumber Data: Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Sedangkan untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud sesuai dengan UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tarif Penyusutan harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
2. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber Data: Undang-undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Tabel 2.6
DAFTAR AKTIVA TETAP
KPRI”MAKARTI” PURWANTORO
PER 31 DESEMBER 2002
(dalam rupiah)

NO	JENIS AKTIVA	HARGA PEROLEHAN	TA RIP %	AKUMULASI DEPRESIASI			NILAI BUKU
				AWAL	DEPRESIASI	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I TANAH							
1	Tanah	24.488.010,00	0	0,00	0,00	0,00	24.488.010,00
	Sub Total	24.488.010,00	0	0,00	0,00	0,00	24.488.010,00
II BANGUNAN							
1	Bangunan Gedung I	22.413.250,00	5	4.812.950,00	1.120.662,00	5.933.612,00	16.479.638,00
2	Bangunan gedung II	38.989.380,00	5	11.696.814,00	1.949.469,00	13.646.283,00	25.343.097,00
3	Pagar I	2.862.000,00	5	346.050,00	143.100,00	489.150,00	2.372.850,00
4	Pagar II	15.857.500,00	5	0,00	792.875,00	792.875,00	15.064.625,00
	Sub Tota	80.122.130,00		16.855.814,00	4.006.106,00	20.861.920,00	59.260.210,00
III MESIN							
1	Mesin F/C I	12.100.000,00	25	3.025.000,00	3.025.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
2	Mesin F/C II	9.600.000,00	25	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	Sub Total	21.700.000,00		5.425.000,00	5.425.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00
IV INVENTARIS							
1	Almari Kayu	6.000,00	20	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

2	Almari Kayu	250.000,00	20	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3	Stempel	6.550,00	20	6.500,00	0,00	6.550,00	0,00
4	Meja Kursi	491.850,00	20	491.850,00	0,00	491.850,00	0,00
5	Timbangan Bascule	43.000,00	20	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
6	Papan Nama	80.150,00	20	80.150,00	0,00	80.150,00	0,00
7	Mesin Ketik	417.000,00	20	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00
8	Rak Kayu	803.000,00	20	803.000,00	0,00	803.000,00	0,00
9	Papan Statistik	72.000,00	20	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
10	Jam Dinding	92.250,00	20	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00
11	Dingklik	70.000,00	20	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
12	Brankas	525.000,00	20	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
13	Rak Buku	28.000,00	20	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
14	Calkulator	154.500,00	20	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00
15	Pres dan Pemotong	350.000,00	20	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
16	Jeklok Penjilit	90.000,00	20	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
17	Besteplay	42.500,00	20	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
18	Lambang Negara	15.000,00	20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
19	Lambang Koperasi	10.000,00	20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20	Bendera	10.000,00	20	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
21	PAM	84.350,00	20	84.350,00	0,00	84.350,00	0,00
22	Alat Dapur	56.300,00	20	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00
23	Calkulator II	50.000,00	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
24	Kunci	7.000,00	20	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
25	Kipas Angin	15.000,00	20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26	Kursi Sudut	300.000,00	20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
27	Kursi Taman	200.000,00	20	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
28	Radio Tape Recorder	170.000,00	20	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
29	Alat dapur	38.000,00	20	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
30	Money Detector	50.000,00	20	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00
31	Tiang Bendera	80.000,00	20	48.000,00	16.000,00	64.000,00	16.000,00
32	Kipas Angin	200.000,00	20	120.000,00	40.000,00	160.000,00	40.000,00
33	Calkulator III	90.000,00	20	36.000,00	18.000,00	54.000,00	36.000,00
34	Pompa air	275.000,00	20	110.000,00	55.000,00	165.000,00	110.000,00
35	Jeglok Besar	130.000,00	20	52.000,00	26.000,00	78.000,00	52.000,00
36	Calkulator IV	110.000,00	20	22.000,00	22.000,00	44.000,00	66.000,00
37	Etalase Alumunium	850.000,00	20	170.000,00	170.000,00	340.000,00	510.000,00
38	Rak Besi	450.000,00	20	90.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00
39	Drum Minyak	80.000,00	20	16.000,00	16.000,00	32.000,00	48.000,00
40	Timbangan	85.000,00	20	17.000,00	17.000,00	34.000,00	51.000,00
41	Mesin Komputer	4.500.000,00	20	0,00	900.000,00	900.000,00	3.600.000,00
42	Meja	425.000,00	20	0,00	85.000,00	85.000,00	340.000,00
43	Tralis	275.000,00	20	0,00	55.000,00	55.000,00	220.000,00
44	Wartel	6.387.000,00	20	0,00	1.277.400,00	1.277.400,00	5.109.600,00
45	Telepon	650.000,00	20	0,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
Sub Total		19.114.450,00		5.188.450,00	2.927.400,00	8.115.850,00	10.998.600,00
Jumlah Total		145.424.590,00		27.469.264,00	12.425.000,00	39.283.139,00	105.596.820,00

Sumber Data: Daftar Aktifa Tetap KPRI "Makarti" Purwanto.

Tabel 2.7
DAFTAR AKTIVA TETAP FISKAL
KPRI “MAKARTI” PURWANTORO
PER 31 DESEMBER 2002
(Dalam Rupiah)

NO	JENIS AKTIVA	TA HUN PER OLEH AN	HARGA PEROLEHAN	TA RIP %	AKUMULASI DEPRESIASI			
					AWAL	DEPRESIASI	AKHIR	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I TANAH								
1	Tanah	-	24.488.010,00	0	0,00	0,00	0,00	24.488.010,00
	Sub Total		24.488.010,00		0,00	0,00	0,00	24.488.010,00
II BANGUNAN								
1	Bangunan Gedung II	1998	22.413.250,00	5	4.482.648,00	1.120.662,00	5.603.310,00	16.809.940,00
2	Bangunan gedung I	1996	38.989.380,00	5	11.696.814,00	1.949.469,00	13.646.283,00	25.343.097,00
3	Pagar I	2000	2.862.000,00	5	286.200,00	143.100,00	429.300,00	2.432.700,00
4	Pagar II	2002	15.857.500,00	5	0,00	792.875,00	792.875,00	15.064.625,00
	Sub Total		80.122.130,00		16.465.662,00	4.006.106,00	20.471.768,00	59.650.362,00
III MESIN								
1	Mesin F/C I	2001	12.100.000,00	25	3.025.000,00	3.025.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
2	Mesin F/C II	2001	9.600.000,00	25	2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	Sub Total		21.700.000,00		5.425.000,00	5.425.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00
IV INVENTARIS								
1	Almari Kayu	-	6.000,00	12,5	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2	Almari Kayu	-	250.000,00	12,5	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3	Stempel	-	6.550,00	12,5	6.500,00	0,00	6.550,00	0,00
4	Meja Kursi	-	491.850,00	12,5	491.850,00	0,00	491.850,00	0,00
5	Timbangan Bascule	-	43.000,00	12,5	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
6	Papan Nama	-	80.150,00	12,5	80.150,00	0,00	80.150,00	0,00
7	Mesin Ketik	-	417.000,00	12,5	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00
8	Rak Kayu	-	803.000,00	12,5	803.000,00	0,00	803.000,00	0,00
9	Papan Statistik	-	72.000,00	12,5	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
10	Jam Dinding	-	92.250,00	12,5	92.250,00	0,00	92.250,00	0,00
11	Dingklik	-	70.000,00	12,5	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
12	Brankas	-	525.000,00	12,5	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
13	Rak Buku	-	28.000,00	12,5	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
14	Calkulator	-	154.500,00	12,5	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00
15	Pres dan Pemotong	-	350.000,00	12,5	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
16	Jeklok Penjilit	-	90.000,00	12,5	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
17	Besteplay	-	42.500,00	12,5	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
18	Lambang Negara	-	15.000,00	12,5	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
19	Lambang Koperasi	-	10.000,00	12,5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20	Bendera	-	10.000,00	12,5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

21	PAM	-	84.350,00	12.5	84.350,00	0,00	84.350,00	0,00
22	Alat Dapur	-	56.300,00	12.5	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00
23	Calukulator II	-	50.000,00	12.5	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
24	Kunci	-	7.000,00	12.5	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
25	Kipas Angin	-	15.000,00	12.5	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26	Kursi Sudut	-	300.000,00	12.5	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
27	Kursi Taman	-	200.000,00	12.5	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
28	Radio Tape Recorder	-	170.000,00	12.5	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
29	Alat dapur	-	38.000,00	12.5	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
30	Money Detector	1999	50.000,00	12.5	18.750,00	6.250,00	25.000,00	25.000,00
31	Tiang Bendera	1999	80.000,00	12.5	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Kipas Angin	1999	200.000,00	12.5	75.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00
33	Calukulator III	2000	90.000,00	12.5	22.500,00	11.250,00	33.750,00	56.250,00
34	Pompa air	2000	275.000,00	12.5	68.750,00	34.375,00	103.125,00	171.875,00
35	Jeglok Besar	2000	130.000,00	12.5	32.500,00	16.250,00	48.750,00	81.250,00
36	Calukulator IV	2001	110.000,00	12.5	27.500,00	13.750,00	41.250,00	68.750,00
37	Etalase Alumunium	2001	850.000,00	12.5	106.250,00	106.250,00	212.500,00	637.500,00
38	Rak Besi	2001	450.000,00	12.5	56.250,00	56.250,00	162.500,00	287.500,00
39	Drum Minyak	2001	80.000,00	12.5	10.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
40	Timbangan	2001	85.000,00	12.5	10.625,00	10.625,00	21.250,00	63.750,00
41	Mesin Komputer	2002	4.500.000,00	12.5	0,00	562.500,00	562.500,00	3.937.500,00
42	Meja	2002	425.000,00	12.5	0,00	53.125,00	53.125,00	371.875,00
43	Tralis	2002	275.000,00	12.5	0,00	34.375,00	34.375,00	240.625,00
44	Wartel	2002	6.387.000,00	12.5	0,00	798.375,00	798.375,00	5.588.625,00
45	Telepon	2002	650.000,00	12.5	0,00	81.250,00	81.250,00	568.750,00
Sub Total			19.114.450,00		4.485.595,00	1.829.625,00	6.815.200,00	12.299.250,00
Jumlah Total			145.424.590,00		26.876.237,00	11.260.731,00	38.136.968,00	107.287.622,00

Sumber Data: Data Olahan Daftar Aktiva Tetap KPRI Makarti Purwantoro

Dari data Daftar Aktiva Tetap di atas diketahui bahwa biaya depresiasi menurut komersial untuk tahun 2002 adalah sebesar Rp 12.425.000,00 dan akumulasinya sebesar Rp 39.283.139,00. Sedangkan biaya depresiasi menurut fiskal adalah sebesar Rp 11.260.731,00 dan akumulasinya sebesar Rp 38.136.968,00. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa biaya depresiasi menurut komersial lebih besar dari fiskal sebesar Rp 1.164.269,00 dan akumulasinya menurut fiskal lebih kecil sebesar Rp 1.146.171,00.

Dari neraca dan laporan rugi laba dapat dibuat rekonsiliasi fiskal berupa rekonsiliasi fiskal neraca dan rekonsiliasi fiskal perhitungan rugi laba.

Perhitungan rekonsiliasi fiskal laporan rugi laba adalah seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.8
KPRI “MAKARTI” PURWANTORO
REKONSILIASI FISKAL
PERHITUNGAN RUGI LABA USP DAN PUSAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2002
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	MENURUT KOMERSIAL	PERBEDAAN		MENURUT FISKAL
		WAKTU	TETAP	
Pendapatan USP				
Jasa USP	303.268.315,00	—	—	303.268.315,00
Jasa PKP				
a. SHU PKP	1.262.300,00	—	6 (1.262.300,00)	0,00
b. jasa Simpanan PKP	3.997.150,00	—	6 (3.997.150,00)	0,00
Diskon Barang	1.527.500,00	—	—	1.527.500,00
Fee Wartel	454.700,00	—	—	454.700,00
Deviden BKE	8.000,00	—	4) (8.000,00)	0,00
Jumlah	310.517.965,00			305.250.515,00
BIAYA BEBAN				
Biaya Operasional	57.093.928,00	—	—	57.093.928,00
Biya hutang	140.873.129,00	—	5) (586.000,00)	140.287.129,00
PMK	80.000.000,00	—	—	80.000.000,00
Jasa pengurus	6.150.000,00	—	—	6.150.000,00
Lain-lain	16.373.829,00	3b) (1.164.269,00)	3a) (4.634.122,00)	10.575.438,00
Jumlah	300.490.886,00			294.106.495,00
SHU				
SHU sebelum pajak	10.027.079,00	—	—	11.144.020,00
Pajak	(1.002.708,00)	—	—	(1.114.402,00)
SHU setelah pajak	9.024.371,00	—	—	10.029.618,00

Sumber Data: Data Olahan Laporan rugi laba USP dan Pusat KPRI Makarti Purwantoro

Tabel 2.9
KPRI”MAKARTI” PURWANTORO
REKONSILIASI FISKAL PERHITUNGAN RUGI LABA PERTOKOAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 2002
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	MENURUT KOMERSIAL	PERBEDAAN		MENURUT FISKAL
		WAKTU	TETAP	
Pendapatan				
Penjualan Barang	370.311.571,00	-	-	370.311.571,00
Waserda				
Penjulan Barang Titipan	8.538.500,00	-	-	8.538.500,00
Pendapatan Unit F/C	40.612.650,00	—	—	40.612.650,00
Jumlah	419.462.271,00	—	—	419.462.271,00
HPP	354.589.281,00	—	—	354.589.281,00
Laba Waserda & F/C	64.873.440,00	—	—	6.873.440,00
Discount Barang Titipan	859.600,00	—	—	859.600,00
Jumlah	65.733.040,00			65.733.040,00

Beban Biaya				
Biaya Bunga Pinjaman	440.000,00	—	—	440.000,00
Administrasi	1.356.150,00	—	—	1.356.150,00
Honor	8.700.000,00	—	—	8.700.000,00
Rekening Listrik	2.901.450,00	—	—	2.901.450,00
Pakaian Dinas	300.000,00	—	1. (300.000,00)	0,00
Lembur F/C	150.000,00	—	—	440.000,00
Transport Kulakan	750.000,00	—	—	1.356.150,00
Jasa Servis Mesin F/C	2.022.675,00	—	—	8.700.000,00
Tunjangan Karyawan	1.913.000,00	—	—	2.901.450,00
Jasa Karyawan	1.500.000,00	—	—	1.500.000,00
Penyusutan Mesin F/C	5.425.000,00	—	—	5.425.000,00
Biaya F/C	20.183.300,00	—	—	20.183.300,00
Uang Makan karyawan	3.744.000,00	—	—	3.744.000,00
PMK	11.500.000,00	—	—	11.500.000,00
Jumlah	60.885.575,00	—	—	60.585.575,00
SHU				
SHU Sebelum Pajak	4.847.465,00	—	—	5.147.465,00
Pajak	(484.747,00)	—	—	(514.747,00)
SHU Setelah Pajak	4.362.718,00	—	—	4.632.718,00

Sumber Data: Laporan rugi laba Pertokoan KPRI Makarti Purwantoro

Tabel 2.10
KPRI"MAKARTI" PURWANTORO
NERACA GABUNGAN KOREKSI FISKAL
PER 31 DESEMBER 2002
 (dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	MENURUT KOMERSIAL	PERBEDAAN		MENURUT FISKAL
		WAKTU	TETAP	
A. AKTIVA				
LANCAR				
Kas	2.329.169,00	-	-	2.329.169,00
Piutang KPRI	1.051.521.543,00	-	-	1.051.521.543,00
Piutang Menengah	140.160.000,00	-	-	140.160.000,00
Piutang Khusus	6.592.121,00	-	-	6.592.121,00
Persediaan Barang waserda	90.381.100,00	-	-	90.381.100,00
Piutang Barang Waserda	27.699.769,00	-	-	27.699.769,00
Jumlah Aktiva Lancar	1.318.683.702,00	-	-	1.318.683.702,00
B.				
PENYERTAAN				
Simpanan Pokok PKPRI	150.000,00	-	-	150.000,00
Simpanan Wajib PKP RI	40.528.340,00	-	-	40.528.340,00
Simpanan sukarela PKP RI	6.751.375,00	-	-	6.751.375,00
Saham Dekopinda	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00
Simpanan Bantu Modal PKP RI	204.100,00	-	-	204.100,00
Jumlah Penyertaan	50.333.815,00	-	-	50.333.815,00
C. AKTIVA				
TETAP				
Inventaris Tanah	24.488.010,00	-	-	24.488.010,00
Gedung Unit I	22.413.250,00	-	-	22.413.250,00
Gedung unit II	39.881.380,00	-	-	39.881.380,00
Mesin Foto Copy	21.700.000,00	-	-	21.700.000,00
Inventaris Kantor dan Toko	19.492.300,00	-	-	19.492.300,00

Bangunan Pagar	18.719.500,00	-	-	18.719.500,00
Akumulasi Penyusutan	(39.283.139,00)	3b) 1.164.269,00 2) (18.098,00)	-	(38.136.968,00)
Jumlah aktiva tetap	107.411.301,00	-	-	108.557.472,00
Total Aktiva	1.476.428.818,00	-	-	1.477.574.989,00
A. PASIVA				
LANCAR				
Hutang PKP RI	132.355.000,00	-	-	132.355.000,00
Tabungan Hari Raya	10.130.000,00	-	-	10.130.000,00
Tabungan Karya wisata	61.220.000,00	-	-	61.220.000,00
Tabungan Deposito	190.996.180,00	-	-	190.996.180,00
Tabungan Masa Depan	50.494.000,00	-	-	50.494.000,00
Tabungan Sukarela	45.550.000,00	-	-	45.550.000,00
Tabungan Pendidikan	10.698.800,00	-	-	10.698.800,00
Tabungan hari Tua	620.000,00	-	-	620.000,00
Simpanan wajib Kredit	43.686.380,00	-	-	43.686.380,00
Dana Pendidikan	1.700.800,00	-	-	1.700.800,00
Dana Sosial	(1.721.715,00)	-	-	(1.721.715,00)
Dana pemdaker	5.810.305,00	-	-	5.810.305,00
Pajak	388.250,00	-	-	388.250,00
Biaya Audit	650.000,00	-	-	650.000,00
Hutang Pihak III	0,00	-	-	0,00
Bunga Simpanan Ymh dibayar	11.856.655,00	-	-	11.856.655,00
Simpanan Bantu Modal	698.766.311,00	-	-	698.766.311,00
Jumlah Pasiva Lancar	1.263.200.966,00	-	-	1.263.200.966,00
B. PASIVA TAK LANCAR				
Hutang PLN	0,00	-	-	0,00
Hutang Jamsostek	0,00	-	-	0,00
Jumlah pasiva Tak Lancar	0,00	-	-	0,00
C. MODAL SENDIRI				
Simpanan pokok KP RI	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
Simpanan Wajib KPRI	69.567.600,00	-	-	69.567.600,00
Cadangan Modal	93.654.469,00	-	-	93.654.469,00
Resiko Kredit	10.522.152,00	-	-	10.522.152,00
Dana	17.609.087,00	-	-	17.609.087,00
Pembangunan Gedung				
Koreksi Fiskal SHU	14.874.544,00	(18.098,00)	(252.672,00)	(270.770,00)
Jumlah Modal Sendiri	213.227.852,00	-	-	214.374.023,00
Jumlah Pasiva dan Modal Sendiri	1.476.428.818,00	-	-	1.477.574.989, 00

Sumber Data: Data Olahan Neraca KPRI Makarti Purwantoro

Tabel 2.11
JURNAL KOREKSI FISKAL

Halaman 1

Tanggal		Keterangan	Ref	Debit	Kredit
2003					
Maret	31	Koreksi Fiskal		300.000,00	-
		- Biaya Pakaian Dinas		-	300.000,00
	31	Koreksi Fiskal		18.098,00	-
		-Akumulasi Penyusutan		-	18.098,00
	31	Koreksi Fiskal		4.634.122,00	-
		- Biaya Lain-lain		-	4.634.122,00
	31	Akumulasi Penyusutan		1.164.269,00	-
		- Penyusutan		-	1.164.269,00
	31	Pendapatan Dividen BKE		8.000,00	-
		-Koreksi Fiskal		-	8.000,00
	31	Koreksi Fiskal		586.000,00	-
		- Biaya Bunga Hutang		-	586.000,00
	31	Pendapatan Jasa PKP		5.259.450,00	-
		- Koreksi Fiskal		-	5.259.450,00

Catatan :

1. Penjurnalan dilakukan penulis pada tanggal 31 Maret 2003
2. Koperasi belum melakukan penjurnalan dan posting ke Buku Besar sehingga belum ada kode akun dalam Buku Besar.

Tabel 2.12
BUKU BESAR KOREKSI FISKAL

Nama Perkiraan: Koreksi Fiskal

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
2003		1	300.000,00	-	300.000,00	-
Maret 31		1	18.098,00	-	318.098,00	-
		1	4.634.122,00	-	4.952.220,00	-
		1	586.000,00	-	5.538.220,00	-
		1	-	8.000,00	5.530.220,00	-
		1	-	5.259.450,00	270.770,00	-

Data di atas berpengaruh terhadap Laporan Rugi Laba dan Neraca. Hal ini terlihat jelas bahwa dengan adanya koreksi fiskal tersebut mengakibatkan SHU

KPRI”Makarti” Purwantoro menjadi bertambah sebesar Rp 1.416.941,00 (Rp16.291.485,00 – Rp 14.874.544,00). Sedangkan neracanya mengalami kenaikan sebesar jumlah dari kenaikan SHU tahun berjalan dikurangi dengan jumlah saldo dari rekening koreksi fiskal Rp 1.146.171,00 (Rp 1.416.941,00 - Rp 270.770,00).

Keterangan:

Laba koperasi terdiri dari laba USP dan laba pertokoan

Laba komersial:

Laba USP = Rp 10.027.079,00

Laba Pertokoan = Rp 4.874.465,00 +
= Rp 14.874.544,00

Laba fiskal:

Laba USP = Rp 11.144.020,00

Laba Pertokoan = Rp 5.147.495,00 +

Dari data rekonsiliasi fiskal di atas dapat dibuat Neraca Fiskal dan Laporan Rugi Laba.

Neraca Fiskal yang dihasilkan dari perhitungan rekonsialiasi fiskal atas neraca gabungan adalah seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.13
KPRI"MAKARTI" PURWANTORO
NERACA GABUNGAN KOREKSI FISKAL
PER 31 DESEMBER 2002
(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
A. AKTIVA LANCAR	
Kas	2.329.169,00
Piutang KPRI	1.051.521.543,00
Piutang Menengah	140.160.000,00
Piutang Khusus	6.592.121,00
Persediaan Barang waserda	90.381.100,00
Piutang Barang Waserda	27.699.769,00
Jumlah Aktiva Lancar	1.318.683.702,00
B. PENYERTAAN	
Simpanan Pokok PKPRI	150.000,00
Simpanan Wajib PKP RI	40.528.340,00
Simpanan sukarela PKP RI	6.751.375,00
Saham Dekopinda	2.700.000,00
Simpanan Bantu Modal PKP RI	204.100,00
Jumlah Penyertaan	50.333.815,00
C. AKTIVA TETAP	
Inventaris Tanah	24.488.010,00
Gedung Unit I	22.413.250,00
Gedung unit II	39.881.380,00
Mesin Foto Copy	21.700.000,00
Inventaris Kantor dan Toko	19.492.300,00
Bangunan Pagar	18.719.500,00
Akumulasi Penyusutan	(38.136.968,00)
Jumlah aktiva tetap	108.557.472,00
Total Aktiva	1.477.574.989,00
A. PASIVA LANCAR	
Hutang PKP RI	132.355.000,00
Tabungan Hari Raya	10.130.000,00
Tabungan Karya wisata	61.220.000,00
Tabungan Deposito	190.996.180,00
Tabungan Masa Depan	50.494.000,00
Tabungan Sukarela	45.550.000,00
Tabungan Pendidikan	10.698.800,00
Tabungan hari Tua	620.000,00
Simpanan wajib Krediat	43.686.380,00
Dana Pendidikan	1.700.800,00
Dana Sosial	(1.721.715,00)
Dana pemdaker	5.810.305,00
Pajak	388.250,00
Biaya Audit	650.000,00
Hutang Pihak III	0,00
Bunga Simpanan Ymh dibayar	11.856.655,00
Simpanan Bantu Modal	698.766.311,00
Jumlah Pasiva Lancar	1.263.200.966,00
B. PASIVA TAK LANCAR	
Hutang PLN	0,00
Hutang Jamsostek	0,00
Jumlah pasiva Tak Lancar	0,00

C. MODAL SENDIRI	
Simpanan pokok KP RI	7.000.000,00
Simpanan Wajib KPRI	69.567.600,00
Cadangan Modal	93.654.469,00
Resiko Kredit	10.522.152,00
Dana Pembangunan Gedung	17.609.087,00
Koreksi Fiskal	(270.770,00)
SHU	16.291.485,00
Jumlah Modal Sendiri	214.374.023,00
Jumlah Pasiva dan Modal Sendiri	1.477.574.989,00

Sumber Data: DATA Olahan Neraca gabungan KPRI Makarti Purwantoro

Laporan perhitungan Rugi laba Fiskal yang dihasilkan dari rekonsiliasi fiskal terhadap Laporan Perhitungan Rugi laba USP dan Pusat adalah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.14
KPRI “MAKARTI” PURWANTORO
REKONSILIASI FISKAL
PERHITUNGAN RUGI LABA USP DAN PUSAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2002
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	FISKAL
Pendapatan USP	
Jasa USP	303.268.315,00
Jasa PKP	
a. SHU PKP	0,00
b. jasa Simpanan PKP	0,00
Diskon Barang	1.527.500,00
Fee Wartel	454.700,00
Deviden BKE	0,00
Jumlah	305.250.515,00
BIAYA BEBAN	
Biaya Operasional	57.093.928,00
Biya hutang	140.287.129,00
PMK	80.000.000,00
Jasa pengurus	6.150.000,00
Lain-lain	10.575.438,00
Jumlah	294.106.495,00
SHU	
SHU sebelum pajak	11.144.020,00
Pajak	(1.114.402,00)
SHU setelah pajak	10.029.618,00

Sumber Data: Data Olahan Laporan Rugi Laba USP dan Pusat KPRI Makarti Purwantoro

Tabel 2.15
KPRI”MAKARTI” PURWANTORO
REKONSILIASI FISKAL PERHITUNGAN RUGI LABA PERTOKOAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 2002
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	FISKAL
Pendapatan	
Penjualan Barang Waserda	370.311.571,00
Penjualan Barang Titipan	8.538.500,00
Pendapatan Unit F/C	40.612.650,00
Jumlah	419.462.271,00
HPP	354.589.281,00
Laba Waserda & F/C	64.873.440,00
Discount Barang Titipan	859.600,00
Jumlah	65.733.040,00
Beban Biaya	
Biaya Bunga Pinjaman	440.000,00
Administrasi	1.356.150,00
Honor	8.700.000,00
Rekening Listrik	2.901.450,00
Pakaian Dinas	0,00
Lembur F/C	440.000,00
Transport Kulakan	1.356.150,00
Jasa Servis Mesin F/C	8.700.000,00
Tunjangan Karyawan	2.901.450,00
Jasa Karyawan	1.500.000,00
Penyusutan Mesin F/C	5.425.000,00
Biaya F/C	20.183.300,00
Uang Makan karyawan	3.744.000,00
PMK	11.500.000,00
Jumlah	60.585.575,00
SHU	
SHU Sebelum Pajak	5.147.465,00
Pajak	(514.747,00)
SHU Setelah Pajak	4.632.718,00
Sumber Data: Data Olahan Laporan Rugi Laba Pertokoan KPRI Makarti Purwantoro	

Karena peredaran brutonya tidak melebihi Rp 50.000.000,00 maka penghitungan pajak berdasarkan pasal 17 UU Perpajakan No 17 Tahun 2000 adalah $10\% \times \text{Rp } 16.291.485,00 = \text{Rp } 1.629.149,00$. Besarnya pajak yang dihasilkan dari laporan keuangan fiskal tersebut menunjukkan adanya perbedaan pajak menurut komersial dan pajak menurut fiskal yaitu sebesar Rp 142.495,00

(Rp 1.629.149,00 – Rp 1.486.654,00). Hal ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan fiskal.

Besarnya pajak yang diakui oleh KPRI Makarti Purwantoro dari laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2002 adalah sebesar Rp 1.486.654,00 dan PPh pasal 25 yang telah dibayar adalah Rp 1.023.850,00 sehingga terjadi pajak kurang bayar sebesar Rp 462.804,00 (Rp 1.486.654,00 - Rp 1.023.850,00). Sedangkan perhitungan pajak berdasarkan rekonsiliasi fiskal menunjukkan bahwa pajak yang terutang sebenarnya adalah Rp 1.629.149,00 sehingga terjadi pajak kurang bayar sebesar Rp 605.299,00 (Rp 1.629.149,00 – Rp 1.023.850,00) atas PPh pasal 25 yang telah dibayarnya. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2002 adalah adanya pajak kurang bayar sebesar Rp 142.495,00 (Rp 462.804 – Rp 605.299,00).

BAB III

TEMUAN

Hal-hal yang ditemukan penulis dari penelitian yang telah dilakukan terhadap data yang diperoleh dari KPRI “Makarti” Purwantoro adalah sebagai berikut :

A. Kelebihan-kelebihan

Kelebihan-kelebihan dari KPRI “Makarti” Purwantoro adalah sebagai berikut :

1. KPRI “Makarti” Purwantoro telah melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu yaitu tidak melebihi batas maksimal pelaporan SPT Tahunan pada tanggal 31 Maret 2003.
2. KPRI “Makarti” Purwantoro telah membayar pajak pasal 25 tepat waktu setiap bulannya yaitu sebelum tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

B. Kekurangan-kekurangan

Kelemahan-kelemahan dari KPRI “Makarti” Purwantoro adalah sebagai berikut:

1. KPRI “Makarti” Purwantoro dalam melakukan penghitungan besarnya depresiasi aktivasnya belum sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. KPRI “Makarti” Purwantoro telah mengeluarkan biaya natura (kenikmatan / fasilitas) yang diberikan kepada karyawannya dan sumbangan yang tidak ada

kaitannya dengan kegiatan usaha tetapi belum dikeluarkan dari penghitungan pajaknya.

3. KPRI “Makarti” Purwanto memperoleh pendapatan berupa Dividen, SHU dan Jasa Simpanan yang seharusnya dikeluarkan dari penghasilan kena pajak tetapi masih diperhitungkan dalam penghitungan pajaknya.
4. Penghitungan pajak dalam SPT Tahunan Badan yang dilaporkan KPRI “Makarti” Purwanto terlalu kecil dari pajak yang seharusnya terutang yaitu sebesar RP 142.495,00 karena pajak yang terutang sebenarnya adalah RP 1.629.149,00 sedangkan pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan hanya sebesar RP 1.486.654,00.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis penulis terhadap data yang diperoleh dari KPRI “Makarti” Purwantoro, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya pajak yang terutang sebenarnya oleh KPRI “Makarti” Purwantoro adalah sebesar Rp 1.629.149,00 ($10\% \times \text{Rp } 16.291.485,00$), sedangkan besarnya pajak dalam SPT Tahunan Badan yang telah dilaporkan ke KPP sebesar Rp 1.486.654,00. Sehingga menunjukkan adanya pajak kurang bayar sebesar Rp 142.495,00.
2. Perbedaan mendasar yang mengakibatkan adanya perbedaan penghitungan laba komersial dan fiskal pada KPRI “Makarti” Purwantoro disebabkan oleh adanya pos-pos rekening pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak boleh menurut Undang-undang atau sebaliknya dan pos-pos pendapatan dan biaya yang sudah diakui menurut akuntansi komersial tetapi pajak belum mengakui atau sebaliknya serta adanya kebijaksanaan akuntansi yang meliputi beda tetap dan beda waktu.

Adapun pos-pos pendapatan dan biaya tersebut adalah sebagai berikut: sssssss

- a. Adanya biaya Pakaian Dinas sebesar Rp 300.000,00 yang diakui sebagai beban biaya dalam akuntansi komersial.
- b. Adanya perbedaan penghitungan akumulasi penyusutan aktiva tetap antara akuntansi komersial dengan fiskal. Akumulasi penyusutan aktiva tetap menurut akuntansi komersial sebesar RP 39.283.139,00 sedangkan

menurut fiskal sebesar Rp 38.136.968,00. sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.146.171,00.

- c. Dalam biaya lain-lain terdapat biaya dana sosial sebesar Rp 4.634.122,00 dan penyusutan sebesar Rp 7.000.000,00 yang mana seharusnya biaya dana sosial tersebut menurut fiskal tidak boleh diakui sebagai biaya tetapi akuntansi komersial mengakuinya. Biaya penyusutan menurut komersial lebih besar sebesar Rp 1.164.269,00 sehingga memperkecil laba kena pajak.
 - d. Dalam pendapatan USP terdapat pembagian Dividen BKE sebesar Rp 8.000,00 (merupakan penghasilan yang bukan obyek pajak).
 - e. Dalam bunga utang USP dan Pusat terdapat tunjangan karyawan sebesar Rp 586.000,00. Tunjangan tersebut menurut fiskal merupakan *non deductible expense* sehingga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
 - f. Pendapatan jasa simpanan PKP telah dikenakan pajak final, namun masih diperhitungkan dalam penghitungan pajak.
3. Pengaruh perbedaan pengakuan laba komersial dan fiskal terhadap SPT Tahunan Badan yang dilaporkan oleh KPRI “Makarti” Purwantoro adalah adanya pajak kurang bayar sebesar Rp 142.495,00. Karena pajak yang terutang sebenarnya adalah Rp 1.629.149,00 sedangkan pajak penghasilan pasal 25 yang telah dibayar oleh KPRI “Makarti” Purwantoro sebesar Rp 1.023.850,00 sehingga terdapat selisih kurang bayar Rp 605.299,00. sedangkan pajak yang diakui oleh KPRI Makarti adalah Rp 1.486.654,00

sehingga menunjukkan pajak kurang bayar sebesar Rp 462.804,00 (Rp 1.486.654,00 – Rp 1.023.850,00). Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pajak kurang bayar sebesar Rp 142.495,00 (Rp605.299,00 – Rp 462.804,00) atas pajak yang telah dibayarnya.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis dari penelitian yang dilakukan di KPRI “Makarti” Purwantoro ini adalah:

1. Untuk KPRI “Makarti” Purwantoro:

- a. Selain membuat laporan keuangan komersial sebaiknya juga membuat laporan keuangan fiskal sebagai dasar penghitungan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sehingga dalam menghitung besarnya pajak yang terutang sebenarnya lebih mudah dan tepat.
- b. Sebaiknya diberikan pembinaan dan pelatihan mengenai perpajakan bagi para anggota atau pengurus, misalnya melalui seminar-seminar tentang perpajakan. Sehingga mereka memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan.

2. Untuk Dirjen Pajak:

Sebaiknya Dirjen Pajak memberikan pembinaan atau penyuluhan dan pelatihan tentang perpajakan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya, agar mereka mengerti dan paham mengenai peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Priantara, Diaz. 2000. *Pemeriksaan dan Penyakartaidikan Pajak*. Jakarta : Djambatan.
- Republik Indonesia. 2000. *Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.
- _____. 2000. *Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung : PT Eresco.
- Tjahjono, Achmad dan Husain, Fakhri. 2000. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.